



Article Informations  
Corresponding Email:  
Sullivandika007@gmail.com

Received: 06/02/2025; Accepted:  
16/02/2025; Published: 30/06/2025

## PERAN PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAIAN DI MALI TAHUN 2021-2023

**Fikry Andika<sup>1)</sup>, Angga Nurdin Rachmat<sup>2)</sup>, Taufan Herdansyah Akbar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian di Mali pada periode 2021 hingga 2023 dengan menggunakan teori Liberalisme Institusional dan Konsep Organisasi Internasional dari Clive Archer yang mencakup peran sebagai arena, instrumen, dan aktor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi PBB serta laporan dari organisasi internasional lainnya. Data dianalisis secara mendalam untuk memahami pola kerja sama dan tantangan yang dihadapi PBB dalam menjaga stabilitas di Mali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB telah memainkan peran penting sebagai arena negosiasi bagi aktor internasional dan regional, instrumen untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan, serta aktor yang mengambil inisiatif dalam mediasi politik dan advokasi hak asasi manusia. Pembahasan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan PBB tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan tetapi juga integrasi berbagai program pembangunan yang melibatkan partisipasi lokal. Pendekatan holistik yang diterapkan PBB menunjukkan relevansi teori liberalisme institusional dalam menangani konflik internasional.

**Kata Kunci:** PBB, Mali, Organisasi Internasional, Misi Perdamaian.

### Abstract

*This research aims to analyze the role of the United Nations (UN) in maintaining peace in Mali during the period 2021 to 2023 by employing the theory of Institutional Liberalism and Clive Archer's concept of international organizations, which includes roles as an arena, instrument, and actor. The research adopts a qualitative descriptive approach with data collection techniques involving literature review and analysis of official UN documents as well as reports from other international organizations. The data were analyzed comprehensively to understand patterns of cooperation and the challenges faced by the UN in maintaining stability in Mali. The findings reveal that the UN has played a significant role as an arena for negotiations among international and regional actors, an instrument for implementing various development and humanitarian programs, and an actor taking initiatives in political mediation and*

*human rights advocacy. The discussion emphasizes that the UN's success is not solely determined by security aspects but also by the integration of various development programs involving local participation. The holistic approach adopted by the UN demonstrates the relevance of institutional liberalism theory in addressing international conflicts.*

**Keywords:** UN, Mali, International Organizations, Peacekeeping Operation.

## PENDAHULUAN

Konflik di Mali telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas keamanan di kawasan Sahel. Sejak kudeta militer tahun 2012 dan pemberontakan bersenjata oleh kelompok Tuareg serta ekstremis Islam, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Berbagai faktor, seperti lemahnya pemerintahan, meningkatnya ancaman terorisme, serta campur tangan aktor eksternal, telah memperumit situasi. Krisis ini tidak hanya berdampak pada keamanan nasional Mali tetapi juga memengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan Afrika Barat (ICG,2016).

Fenomena konflik di Mali mencerminkan ketidakstabilan yang berkepanjangan akibat perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak. Sejak 2012, kelompok separatis dan jihadist telah menguasai sebagian wilayah utara Mali, yang mengakibatkan hilangnya kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah strategis. *Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali* (MINUSMA), yang didirikan pada tahun 2013, telah berupaya menstabilkan situasi, tetapi tantangan seperti serangan militan dan kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat membuat misi ini sulit mencapai keberhasilan yang optimal. Realitas ini menunjukkan bahwa Mali masih menghadapi krisis multidimensi yang memerlukan perhatian internasional. Di sisi lain, kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang berkelanjutan di Mali melalui penguatan kapasitas pemerintah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan implementasi resolusi konflik yang komprehensif. PBB, bersama dengan aktor regional seperti Uni Afrika dan *Economic Community of West African States* (ECOWAS), diharapkan dapat memperkuat peran mereka dalam diplomasi dan rekonsiliasi nasional. Selain itu, pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek keamanan,

ekonomi, dan sosial harus diterapkan untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi konflik yang berlangsung.

Disamping hal tersebut, keberadaan misi penjaga perdamaian PBB, khususnya melalui MINUSMA, menjadi salah satu instrumen penting dalam meredam eskalasi konflik di Mali. Meskipun telah beroperasi sejak 2013, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk serangan terhadap pasukan perdamaian, ketidakstabilan politik dalam negeri, serta keterbatasan sumber daya hingga batasan penelitian yakni pada tahun 2023. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa peran PBB dalam menjaga perdamaian di Mali pada periode 2021-2023.

Urgensi penelitian ini yakni medalmi kajian hubungan internasional, terutama dalam memahami peran organisasi internasional dari kacamata Clive Archer yang menekankan pada tiga peran yakni sebagai Instrumen, Aktor, dan Arena (Clive Archer, 2001). Dengan keadaan meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas negara, peran organisasi internasional dalam mitigasi konflik menjadi semakin relevan. Studi ini juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi komunitas internasional dalam meningkatkan efektivitas operasi pemeliharaan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB dalam menjaga perdamaian di Mali selama periode 2021-2023. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi sejauh mana unit atau lembaga dibawah naungan PBB berkontribusi dalam menstabilkan situasi keamanan, memperkuat institusi pemerintahan, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan di negara tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan peluang dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Dalam kajian ini, digunakan teori Liberalisme Institusional yang menekankan peran institusi internasional dalam mengurangi anarki dalam sistem global serta teori Peran Organisasi Internasional dari Clive Archer yang melihat organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor. Studi terdahulu menunjukkan bahwa operasi pemeliharaan perdamaian sering kali menghadapi dilema antara efektivitas militer dan kepentingan politik

domestik negara penerima misi. Serta Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi dari PBB, laporan organisasi internasional lainnya, serta penelitian akademik terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami pola kerja sama internasional dalam menangani konflik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perdamaian di Mali. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan global dalam pemeliharaan perdamaian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. PBB Sebagai Instrumen**

PBB memainkan peran sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian di Mali melalui MINUSMA, sebuah misi yang diberikan mandat untuk menstabilkan negara yang mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan sejak 2012. MINUSMA bertujuan untuk mendukung proses rekonsiliasi nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Dengan kehadiran misi ini, PBB berharap dapat mengurangi intensitas konflik dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pembangunan kembali institusi negara Mali. MINUSMA sebagai instrumen perdamaian diwujudkan melalui berbagai operasi penjaga perdamaian yang melibatkan personel militer dan sipil dari berbagai negara anggota PBB. Operasi ini mencakup patroli keamanan di wilayah rawan konflik, perlindungan terhadap penduduk sipil, serta pengawasan terhadap perjanjian gencatan senjata. Keberadaan pasukan penjaga perdamaian bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan mencegah eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang terus berkembang. Selain operasi militer, PBB juga menggunakan MINUSMA sebagai sarana untuk memperkuat lembaga pemerintahan Mali. Salah satu program utama yang dijalankan adalah pelatihan bagi aparat keamanan lokal guna meningkatkan kapasitas

mereka dalam menjaga stabilitas domestik (SG MINUSMA Report, 2012). Dengan demikian, PBB tidak hanya berfokus pada upaya jangka pendek dalam mengurangi konflik, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi sistem keamanan Mali di masa depan.

Sebagai instrumen, PBB tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian oleh kelompok bersenjata di Mali. Kelompok militan seperti *Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin* (JNIM) dan *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS) sering kali menargetkan pasukan perdamaian PBB sebagai bagian dari strategi mereka untuk melemahkan kehadiran internasional di Mali. Serangan ini menyebabkan meningkatnya korban jiwa di antara personel penjaga perdamaian dan menghambat mobilitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Selain ancaman keamanan, PBB juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan politik dari pemerintah Mali. Beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat, seperti pembatasan terhadap operasi MINUSMA dan kerja sama dengan aktor-aktor keamanan non-PBB, telah mengurangi efektivitas misi ini dalam menjalankan mandatnya. Kurangnya koordinasi antara PBB dan pemerintah nasional menciptakan ketegangan yang dapat memperlambat proses stabilisasi di Mali.

PBB sebagai organisasi internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dan mengurangi anarki dalam sistem internasional. Dengan menyediakan mekanisme kolektif seperti MINUSMA, PBB berupaya membangun sistem keamanan global yang lebih stabil. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kepentingan politik negara-negara anggota, dan dinamika konflik domestik sering kali membatasi efektivitas peran ini. Di sisi lain, terdapat pula dilema dalam penggunaan MINUSMA sebagai instrumen perdamaian, terutama dalam hal independensi operasi. Beberapa negara anggota PBB yang berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian memiliki kepentingan strategis di Mali, yang dapat mempengaruhi cara kerja misi tersebut. Ketergantungan pada negara-

negara penyumbang pasukan membuat keputusan dalam MINUSMA tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik luar. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas MINUSMA sebagai instrumen perdamaian adalah dengan memperkuat koordinasi antara berbagai aktor yang terlibat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan dialog antara PBB, Uni Afrika, ECOWAS, dan pemerintah Mali diharapkan dapat menciptakan strategi yang lebih kohesif dalam menangani konflik. Selain itu, peningkatan pelatihan dan perlengkapan bagi personel MINUSMA dapat membantu mereka menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Salah satu inisiatif PBB yang berkontribusi besar dalam stabilisasi Mali adalah *United Nations Integrated Strategy for the Sahel* (UNISS). Program ini dirancang untuk menangani akar permasalahan ketidakstabilan di kawasan Sahel dengan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek keamanan, pembangunan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. UNISS bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai badan PBB dalam mendukung upaya pemerintah setempat dalam mengurangi konflik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor kemanusiaan, *World Food Programme* (WFP) memainkan peran penting dalam memastikan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak konflik di Mali. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan gangguan rantai pasokan akibat ketidakstabilan, kehadiran WFP menjadi krusial dalam menanggulangi ancaman kelaparan dan malnutrisi. WFP tidak hanya mendistribusikan bantuan pangan, tetapi juga melaksanakan program ketahanan pangan jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian lokal serta ketahanan ekonomi komunitas.

Selain itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) berperan dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Mali. UNDP bekerja untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memberikan layanan publik yang efektif, memperkuat institusi demokrasi, serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan dengan memperkuat sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Di bidang keamanan dan hukum, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) berkontribusi dalam upaya pemberantasan perdagangan narkotika, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara yang menjadi faktor utama ketidakstabilan di Mali. UNODC bekerja sama dengan otoritas lokal dan regional untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan terorganisir serta memperkuat sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan berbasis hukum, UNODC berupaya mengurangi pendanaan kelompok bersenjata yang sering kali berasal dari aktivitas ilegal seperti perdagangan narkotika dan penyelundupan manusia.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi di Mali, MINUSMA tetap menjadi ujung tombak instrumen utama PBB dalam menjaga perdamaian di Mali. Dengan terus menyesuaikan pendekatan dan strategi mereka, PBB berupaya memastikan bahwa kehadiran mereka di Mali tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan perdamaian. Oleh karena itu, peran PBB sebagai instrumen harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Mali. Analisis mengenai peran PBB sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian di Mali menunjukkan bahwa meskipun memiliki banyak tantangan, kehadiran MINUSMA tetap berkontribusi pada stabilitas jangka panjang negara tersebut. Dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pasukan penjaga perdamaian, dan mengadaptasi strategi terhadap dinamika konflik yang berkembang, PBB dapat terus berperan sebagai kekuatan utama dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Mali.

## **2. PBB Sebagai Arena**

PBB tidak hanya berperan sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian di Mali, tetapi juga sebagai arena bagi berbagai aktor internasional dan regional dalam menyelesaikan konflik. Sebagai

forum global, PBB memberikan ruang bagi negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menetapkan kebijakan kolektif terkait stabilitas di Mali. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara anggota, organisasi internasional, dan aktor non-negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dewan Keamanan PBB memiliki peran sentral dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian konflik di Mali. Melalui berbagai resolusi, Dewan Keamanan menetapkan mandat untuk Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensional PBB di Mali (MINUSMA) dan mendukung berbagai inisiatif diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, PBB bertindak sebagai fasilitator bagi proses negosiasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB dan berbagai badan PBB lainnya juga memberikan ruang bagi negara-negara untuk menyampaikan pandangan dan menyusun kebijakan mengenai situasi di Mali. Forum-forum ini memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi perspektif dan pengalaman, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani konflik.

#### **Resolusi DK-PBB untuk Mali Tahun 2021-2023**

Tahun	Mandat	Isi
2021	Resolusi 2584	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekonsiliasi Politik di Mali</li><li>• Memperpanjang mandat MINUSMA hingga 30 Juni 2022</li><li>• Latihan militer dengan G5 Sahel</li></ul>
2021	Resolusi 2590	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peninjauan ulang resolusi sebelumnya dan meneruskan resolusi 2347 (2017)</li><li>• Mendesak Pemerintahan Mali untuk mengambil tindakan segera dan konkret dalam mengelola sistem pemerintahan</li><li>• Memperbarui perpajangan mandat MINUSMA hingga 31 Agustus 2022</li></ul>
2022	Resolusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen resiko dan konflik terhadap</li></ul>

	2640	<p>serangan teroris dan kelompok bersenjata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian perdamaian dan rekonsiliasi di Mali</li> <li>• Memperpanjang mandat MINUSMA hingga 30 Juni 2023</li> <li>• MINUSMA mengawal perjanjian perdamaian dan rekonsiliasi di Mali</li> </ul>
2023	Resolusi 2690	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakhiri mandat MINUSMA per 30 Juni 2023</li> <li>• Penarikan Misi MINUSMA serta memberhentikan operasinya dan pemindahan tugas ke UNOWAS</li> </ul>

Sumber: <https://minusma.unmissions.org/en/documents>

Salah satu contoh nyata dari peran PBB sebagai arena adalah keterlibatan organisasi regional seperti Uni Afrika (UA) dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dalam menyelesaikan konflik di Mali. PBB memberikan platform bagi organisasi-organisasi ini untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi regional. Peran PBB sebagai arena juga terlihat dalam perundingan damai antara pemerintah Mali dan kelompok pemberontak. PBB memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada stabilitas jangka panjang. Dengan menyediakan ruang netral untuk berdialog, PBB membantu mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara aktor-aktor yang bertikai.

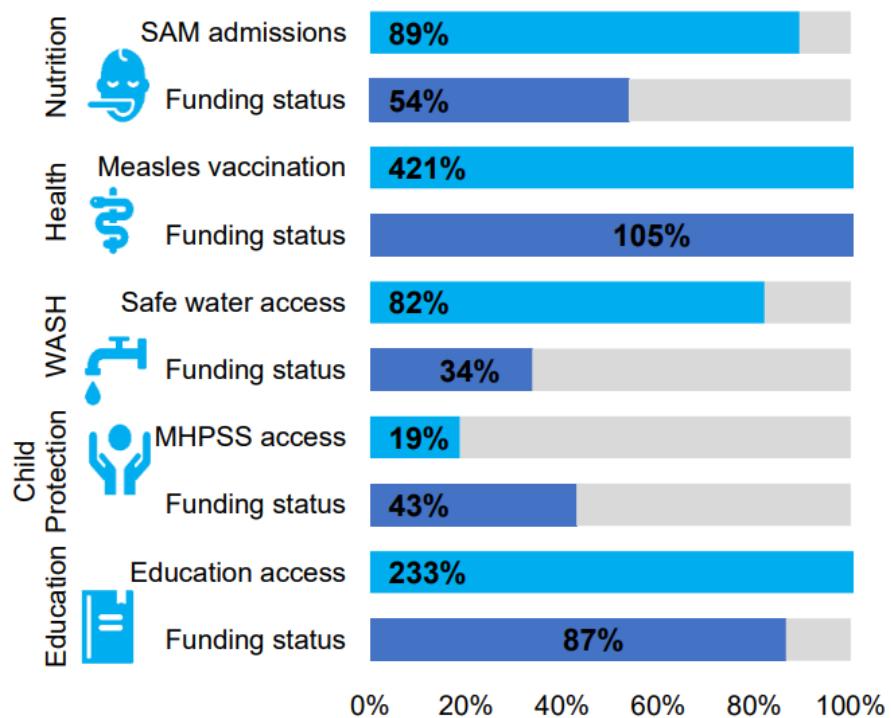
PBB sebagai arena sering kali menghadapi kendala, seperti perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota. Dalam beberapa kasus, negara-negara besar memiliki agenda politik yang berbeda, sehingga memperlambat proses negosiasi dan pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan konsensus global. Terdapat juga tantangan dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati di dalam forum PBB. Keputusan yang dihasilkan sering kali memerlukan dukungan

dari pemerintah Mali dan masyarakat internasional untuk dapat diterapkan secara efektif. Kurangnya komitmen dari aktor lokal dapat menghambat efektivitas resolusi yang telah diadopsi. Peran PBB sebagai arena menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya bertindak sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai tempat bagi berbagai pihak untuk mencari solusi bersama. Dengan memperkuat mekanisme dialog dan meningkatkan koordinasi dengan aktor-aktor regional, PBB dapat terus berfungsi sebagai forum utama dalam penyelesaian konflik di Mali.

### 3. PBB Sebagai Aktor

Selain bertindak sebagai instrumen dan arena bagi negosiasi, PBB juga memainkan peran aktif sebagai aktor independen dalam menjaga stabilitas di Mali. Sebagai aktor global, PBB tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi juga sebagai inisiatör berbagai kebijakan dan intervensi dalam upaya menciptakan perdamaian di Mali. PBB melalui berbagai lembaga di bawah naungannya telah menginisiasi dan menjalankan program-program yang berfokus pada aspek keamanan, pembangunan ekonomi, dan hak asasi manusia di Mali.

**Capaian UNICEF di Mali 2021-2023 (UNICEF MALI ANNUAL REPORT)**



Di bidang perlindungan anak, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memainkan peran penting dalam memastikan hak anak-anak yang terdampak konflik di Mali tetap terjaga. UNICEF menyediakan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi serta perekutan oleh kelompok bersenjata. Program vaksinasi dan layanan kesehatan dasar yang dijalankan UNICEF telah membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah konflik.

Sementara itu, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berperan dalam menangani pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang berkepanjangan. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Mali dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan bahwa para pengungsi memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, serta pendidikan. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi internal akibat konflik, UNHCR terus berupaya mengurangi dampak kemanusiaan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan, *United Nations Population Fund* (UNFPA) memiliki peran krusial dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta menyediakan akses terhadap program kesehatan reproduksi bagi perempuan yang berada di wilayah konflik. UNFPA juga aktif dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan memberikan perlindungan dan pendampingan bagi para korban. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan di tengah konflik.

Selain itu, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) memainkan peran penting dalam mengoordinasikan respons kemanusiaan di Mali. OCHA bertanggung jawab dalam mengoordinasikan distribusi bantuan darurat, memastikan adanya koordinasi antar badan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya, serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas

dalam situasi darurat. Dengan meningkatnya ancaman kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam, OCHA berupaya meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai aktor global, PBB juga mengoordinasikan upaya rekonstruksi dan pembangunan pascakonflik di Mali. Melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan regional, PBB mendorong implementasi kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi stabilitas jangka panjang di negara tersebut. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor, PBB menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan pendanaan yang sering kali menghambat efektivitas program yang dijalankan. Banyak negara donor yang mengalami kelelahan dalam memberikan dukungan finansial, sehingga mengurangi fleksibilitas PBB dalam mengimplementasikan kebijakan di Mali. Selain itu, resistensi dari pemerintah Mali terhadap intervensi internasional juga menjadi tantangan tersendiri bagi PBB. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat terkadang bertentangan dengan agenda yang dibawa oleh PBB, sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua pihak. Situasi ini menghambat kelancaran implementasi program-program PBB di lapangan. Dengan terus melakukan adaptasi terhadap kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan aktor-aktor lokal, PBB dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Mali.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian di Mali melalui tiga fungsi utama: sebagai instrumen, arena, dan aktor. Melalui MINUSMA, PBB berperan sebagai instrumen dalam menstabilkan situasi keamanan, memperkuat kapasitas pemerintahan Mali, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Dengan mandat yang diberikan oleh

Dewan Keamanan PBB, MINUSMA berupaya mengurangi tingkat kekerasan dan mendukung rekonsiliasi nasional di Mali. Sebagai arena, PBB menyediakan ruang bagi berbagai aktor internasional, regional, dan domestik untuk berunding serta mencapai kesepakatan terkait penyelesaian konflik di Mali. Forum internasional yang difasilitasi oleh PBB telah memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Uni Afrika dan ECOWAS, dalam menangani konflik ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota dan resistensi dari pemerintah Mali terhadap beberapa kebijakan PBB. Selain itu, PBB juga berperan sebagai aktor independen dalam menciptakan perdamaian di Mali. Melalui badan-badannya seperti UNDP, UNICEF, UNHCR, dan WFP, PBB berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta distribusi bantuan kemanusiaan. Tantangan utama dalam menjalankan peran ini meliputi keterbatasan sumber daya, ancaman dari kelompok bersenjata, serta kurangnya dukungan politik dari pemerintah setempat. Keberhasilan PBB dalam menjaga perdamaian di Mali sangat bergantung pada pendekatan yang lebih adaptif dan terkoordinasi dengan berbagai aktor internasional dan lokal. Dengan memperkuat sinergi antara MINUSMA, pemerintah Mali, organisasi regional, serta masyarakat sipil, efektivitas misi perdamaian PBB dapat ditingkatkan. Upaya yang lebih holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan mencegah kembalinya konflik di Mali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Archer, Clive. International Organisations 3rd Editio0n. Routledge, London. 2001.
- Barkindo, Atta. “The Sahel: A New Theatre for Global Jihadist Groups?” Counter Terrorist Trends and Analyses, vol. 12, no. 2, 2020, pp. 21–26.
- Boutros-Ghali, Boutros. An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping. United Nations, 1992.
- Campagnolo, Lorenza, et al. Assessing SDGs: A New Methodology to Measure Sustainability. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), 2015.
- DELGADO, CAROLINE, et al. “The World Food Programme’s Contribution to Improving the Prospects for Peace.” THE WORLD FOOD PROGRAMME’S CONTRIBUTION TO IMPROVING THE PROSPECTS

- FOR PEACE: Preliminary Report, Stockholm International Peace Research Institute, 2019, pp. 7–15.
- Fejerskov, Adam Moe, et al. "West Africa: MINUSMA, UN AND G5 SAHEL." REGIONAL INTERESTS IN AFRICAN PEACE OPERATIONS, Danish Institute for International Studies, 2017, pp. 41–59.
- Gauthier Vela, Vanessa. "MINUSMA and the Militarization of UN Peacekeeping." International Peacekeeping, vol. 28, no. 5, 2021, pp. 838–863.
- HUNT, CHARLES T. "Challenges Facing UN Police in Protecting Civilians." Protection through Policing: The Protective Role of UN Police in Peace Operations, International Peace Institute, 2020, pp. 10–23.
- International Crisis Group. "Central Mali in Crisis (2012–2013)." Central Mali: An Uprising in the Making?, International Crisis Group, 2016, p. Page 7–Page 9.
- J. Creswell. Research Design: Qualitative & Quantitative Approach. Thousand Oaks: Sage publications, 1999.
- KEOHANE, ROBERT O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. REV-Revised, Princeton University Press, 1984.
- Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. Power and Interdependence. 4th ed., Pearson, 2012.
- Mangan, Fiona, and Matthias Nowak. THE WEST AFRICA—SAHEL CONNECTION: Mapping Cross-Border Arms Trafficking. Small Arms Survey, 2019.
- Ministère de la Santé et du Développement Social du Mali. Discours du Ministre Délégué à la 72ème Session du Comité Exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Gouvernement du Mali, Oct. 2021.
- Missinhoun, Ademonkoun Rodolphe. Localizing Multidimensional Poverty Assessments for Inclusive Public Policies: The Case for a Communal Poverty Profile in Mali. UNDP, Feb. 2024.
- Nicolai, Susan, et al. "References." Strengthening Coordinated Education Planning and Response in Crisis Contexts: Synthesis Report, ODI, 2020, pp. 37–40.
- Reilly, Edward R. UN Peacekeeping in Civil Wars. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung 2020.
- TOBIE, AURÉLIEN. LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE MALIENNE : UNE NOUVELLE PERSPECTIVE. Stockholm International Peace Research Institute, 2017.
- Transforming Children's Futures: Amplifying Humanitarian Impact in the Central Sahel. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), June 2024.
- UNICEF. Mali Annual Report 2023. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Nov. 2023.
- Vermeij, Lotte. MINUSMA: Challenges on the Ground. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), 2015.
- World Food Programme. Summary Report on the Evaluation of the Country Strategic Plan for Mali (2020–2024). Rome: WFP, 2024.

